

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus adalah penyakit menular pada manusia yang kini diketahui merupakan virus yang disebabkan oleh bakteri yang penyebarannya dilihat dari seseorang menular ke orang lain. Penularan bisa terjadi jika pada seorang tersebut adanya kontak fisik, misal melewati sentuhan, melalui udara saat bersin atau batuk (Nahumury et al., 2020).

Berbagai kebijakan dan tindak lanjut telah dicoba dalam mencari penanganan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Dalam situasi tersebut pemerintah hingga saat ini mempelajari adaptasi dengan respon dan kebijakan yang telah diputuskan dalam melindungi dan menjalani tanggung jawab sebagai mana mestinya. Pandemi ini telah menjadi suatu tindakan yang harus dipelajari kebijakan publik yang berskala dunia guna mendorong sekaligus memberikan kesempatan bagi yang ingin berinovasi dalam mengatasi krisis Kesehatan yang berdampak besar ini (Pamungkas & Bakrie, 2021).

Pada masa pandemi Covid-19 memberikan keterlibatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik yang berdampak hampir semua negara, termasuk di Negara Indonesia sendiri (Falefi & Purwoko, 2020). Pembatasan pada kegiatan masyarakat Indonesia sebagai usaha dalam menangani Covid-19 telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan secara nasional (Hadiwardoyo, 2020). Berbagai sektor yang terkena dampak diantaranya segi transportasi, perdagangan, pariwisata serta kesehatan, akan tetapi sektor yang sangat terpengaruhi adalah sektor rumah tangga (Falefi & Purwoko, 2020). Termasuk sektor ekonomi kecil seperti sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan UMKM. Pada Indonesia, UMKM merupakan salah satu bidang Ekonomi Nasional yang dapat dilihat dari peresapan tenaga kerja (Sugiri, 2020). Usaha kecil inilah yang paling sangat terdampak oleh krisis adanya penyakit Covid-19, banyak yang gulung tikar atau menutup usahanya sementara waktu karena bisa kemungkinan dari faktor konsumen masyarakatnya ataupun dari kebijakan aturan pemerintah setempat.

Dari akibat pandemi Covid-19 kepada Pelaku Usaha dapat di pandang dari sisi penawaran dan permintaan. Dari penawaran, akibat adanya pandemi Covid-19, banyak berkurangnya tenaga kerja pada Pelaku Usaha, Hal tersebut terjadi alasanya karena menjaga kesehatan dan adanya peraturan pemberlakuan pembatasan sosial distancing atau penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan hingga saat ini ada kebijakan terbaru mengenai Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKKM). Karena beberapa sebab yang memungkinkan berujung pada tidak maunya masyarakat bekerja untuk sementara waktu saat pandemi Covid-19 masih ada. Pada sisi permintaan, mengalami kekurangannya permintaan akan adanya barang dan jasa yang akan berdampak pada Pelaku Usaha, sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal sehingga mengurangnya likuiditas usaha. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pendapatan sama sekali. Karena pelaku usaha tidak memiliki kemampuan membayar para pekerja atau pemberhentian kerja karena pemasukan yang tidak sesuai atau tidak mencapai target penjualan (Sugiri, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan deskripsi mengenai kebijakan pemerintah dalam membantu Pelaku Usaha yang khususnya berada pada Kabupaten Ponorogo yang terkena dampak Covid-19. Selain itu penelitian ini menjelaskan gambaran mengenai strategi untuk mempertahankan ekonomi masyarakat setempat untuk mencapai pelengkap kebijakan tersebut. Selain itu juga mengantisipasi atau mempersiapkan sebelum terjadinya PSBB atau PKKM diberlakukan pada Pelaku Usaha yang berada pada Kabupaten Ponorogo.

Dengan adanya PSBB atau PPKM maka sebagian kantor atau pelaku usaha dilarang beroperasi, untuk waktu yang cukup lama, dan mengakibatkan kerugian ekonomi. Pada tulisan ini juga mewakili beberapa atau dibuat sebelum adanya PSBB akan berakhir sehingga total kerugian yang diperoleh secara presisi belum diketahui. Untuk mempermudah dalam perhitungan. Analisis ini dimulai dari beberapa kota seperti Jabodetabek, dengan asumsi pelaksanaan selama 1 bulan atau jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan apabila PSBB atau sejenis Pembatas sosial

diperpanjang Kembali atau di perluas ke berbagai kota-kota lainnya, maka otomatis dampat kerugian membesar sesuai perbandingan waktu dan tempat luasan area (Hadiwardoyo, 2020).

Untuk mengatasi pembatasan sosial tersebut yang berupa himbauan tersebut tidak efektif dalam mencegah penularan Covid-19 dan terjadi resiko penurunan ekonomi pada pelaku usaha yang berada pada kabupaten ponorogo dan juga tetap pada koridor peraturan pemerintah mengenai Protokol Kesehatan tentang menghindari terjadinya penyebaran virus Covid-19 serta agar tetap berjalan secara normal, maka peneliti melakukan penerapan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memonitoring menilai kelayakan Protokol Kesehatan pada pelaku usaha agar tetap terus beroperasi dan menjalankan roda perekonomian sebagai mana mestinya (Prayitno et al., 2020). Agar tujuan SPK ini dapat berjalan atau berhasil degan baik maka di dukung dengan metode Simple Additive Weighting (SAW). Dengan menerapkan SPK tersebut memiliki Kriteria Penilaian dalam protokol kesehatan, diantaranya dari Segi Kebersihan, Kesehatan, Perlengkapan, Keramaian, dan Kesadaran Karyawan serta Konsumen (Pengujung) yang dimaksud konsumen atau pengunjung harus menerapkan psychal distancing atau jaga jarak, pelaku usaha memiliki standart kebersihan, tersedianya kelengkapan kesehatan dalam penanganan Covid-19 seperti Handsanitizer, pengecekan suhu tubuh dengan Termogun, Disinfektan dan yang lain, kesehatan karyawan, penggunaan masker, dan pembatasan waktu (Nasution & Irwanto, 2021).

Simple Additive Weighting (SAW) merupakan metode yang akan digunakan atau diterapkan dalam penelitian ini. Konsep dasar dari metode ini mencari penjumlahan yang terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari setiap atribut yang ada. Metode SAW membutuhkan normalisasi matrik keputusan (X) pada suatu skala yang dapat dibandingkan dengan alternatif lainnya (Nugroho Joko Usito, 2013).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menentukan kesiapan pelaku usaha dalam menyikapi Protokol Kesehatan Covid-19 ?

1.3 Tujuan

Tujuan Penelitian ini adalah menerapkan metode Simple Additive Weighting pada Sistem Pendukung Keputusan penilaian Protokol Kesehatan pada Pelaku Usaha Di Kabupaten Ponorogo.

1.4 Manfaat

Manfaat adanya sistem SPK penilaian protokol kesehatan pada pelaku usaha ini yaitu mempermudah pemerintah dalam melakukan proses penilaian terhadap pelaku usaha guna memonitoring serta mencegah adanya Covid-19 dan memberikan kesempatan untuk tetap buka sesuai anjuran pemerintah agar roda perekonomian tetap berjalan.

1.5 Batasan Masalah

1. Penelitian dilakukan studi kasus pada Dinas Kesehatan Satgas Covid-19
2. Sistem ini digunakan oleh Internal dan Pelaku Usaha
3. Perancangan Sistem dilakukan dengan Bahasa Pemrograman PHP dan HTML
4. Metode yang digunakan pada Sistem Pendukung Keputusan dengan menggunakan Metode SAW
5. Hasil Penilaian dinyatakan Sesuai Kriteria Protokol Kesehatan dengan Penilaian 80 keatas bahwa hasil akhir dari sistem masih dalam bentuk angka belum ada keterangan.